

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap terpenting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan Undang Undang serta dapat berupa perintah eksekutif penting atau keputusan pengadilan. Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi merupakan bentuk realisasi dari keputusan kebijakan dengan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan, menetapkan dengan jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menentukan berbagai cara untuk merancang atau mengatur proses implementasinya. Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal baik dari segi finansial, manusia dan infrastruktur, selain itu komunikasi yang efektif juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, menyampaikan informasi secara transparan dan menerima umpan balik dari masyarakat, serta dengan adanya koordinasi yang efektif sebagai fondasi yang mendukung kolaborasi yang baik antar pihak pihak yang terkait.

Namun dalam konteks perkotaan yang kompleks, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan yang dapat menciptakan rasa frustrasi di kalangan masyarakat, hal ini terjadi ketika masyarakat merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi karena kebijakan yang dirancang tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan sering melibatkan lembaga dengan tujuan berbeda, sehingga kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan adanya tumpang tindih dan konflik yang menghambat kemajuan dari implementasi program kebijakan. Banyaknya kebijakan yang dirancang tanpa melibatkan masukan dari masyarakat yang akan terdampak menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kebijakan sehingga berpotensi menghambat keberhasilan implementasi.

Makassar sebagai Ibukota provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, sehingga setiap tahunnya Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perkotaan. Salah satu permasalahan yang terjadi di kota Makassar yaitu permasalahan ekonomi pasca covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas bisnis terutama di sektor pariwisata dan perdagangan. Pemulihan ekonomi yang lambat menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemulihan yang efektif untuk mengembalikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Makassar. Dalam konteks ini, Walikota Makassar periode tahun 2021-2024 telah menciptakan berbagai program sebagai bentuk upaya dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Makassar, salah satu contohnya yaitu program Lorong Garden yang dibuat oleh Walikota Makassar untuk meningkatkan penghijauan kota.

Dengan semakin meningkatnya potensi lorong, Walikota Makassar kemudian meluncurkan program Lorong Wisata (LONGWIS) pada akhir tahun 2021 sebagai upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dan pariwisata pasca COVID-19. Program ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Makassar, tidak hanya untuk mengatasi masalah sampah, tetapi juga untuk menarik wisatawan dengan melibatkan masyarakat dan perangkat daerah dengan memanfaatkan lorong lorong sebagai ruang

produktif untuk kegiatan ekonomi, sosial dan wisata. Pada tahun pertama pelaksanaan program Lorong Wisata, Pemerintah Kota Makassar menetapkan target untuk membentuk 7 lorong di setiap kelurahan. Di mana pada tahun 2022, lebih dari 1.000 Lorong Wisata telah berhasil terbentuk di seluruh wilayah Kota Makassar, dengan target keseluruhan mencapai 5.000 lorong selama masa jabatan Walikota 2021-2024.

Pembentukan program Lorong Wisata di Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang pembentukan program Lorong Wisata. Pembentukan program Lorong Wisata bertujuan untuk melakukan pemetaan dan mengelompokkan potensi lorong dengan menggunakan teknologi informasi, berdasarkan potensi yang ada, termasuk potensi SDM, kondisi fisik lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi di lorong sesuai dengan potensi pengembangan usaha, kawasan kuliner, pembinaan budaya dan seni, peningkatan budidaya tanaman, serta berbagai potensi lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kota Makassar (Ameilia, 2023).

Dengan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan program Lorong Wisata ini yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat sumber daya manusia yang meliputi Dewan Lorong, Gugus Tugas Lorong, Tim Teknis Lorong, Sekretariat Tugas Lorong Wisata, dan pengawasan. Di mana Dewan Lorong terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. Sementara itu, Gugus Tim Lorong Wisata terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya adalah Tim Teknis Lorong Wisata yang dibentuk oleh masing masing SKPD sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan tugas dan perannya dalam melaksanakan program. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penetapan Lorong Wisata, melaksanakan kegiatan, dan melaporkan hasil kegiatan (Sabirin et al., 2024).

Salah satu Kecamatan di Kota Makassar yang sudah menerapkan Lorong Wisata yaitu Kecamatan Tallo, di mana kecamatan Tallo telah menerapkan 105 Lorong Wisata pada 15 kelurahan. Kelurahan Lakkang menjadi salah satu kelurahan yang telah menerapkan program Lorong Wisata, pada tahun 2022 terdapat 7 Lorong Wisata yaitu Lorong Wisata Paraikatte, Lorong Wisata Jannang Pabe 3, Lorong Wisata Nurul Anshar 5, Lorong Wisata Turungan Lompoa, Lorong Wisata Nurul Anshar 6, Lorong Wisata Kampung Ce'de 2, dan Lorong Wisata Nurul Ikhlas 3. Namun tidak semua lorong wisata di Kelurahan berjalan dengan baik, contohnya Lorong Wisata Turungan Lompoa, Lorong Wisata Nurul Ikhlas 3, dan Lorong Wisata Jannang Pabe 3 terlihat lebih aktif dan ramai dikunjungi. Ketiga Lorong Wisata ini memiliki daya tarik yang unik seperti adanya hutan bambu pada lorong wisata, dekorasi lorong yang unik serta adanya peninggalan budaya berupa bunker Jepang yang dapat mengenalkan sejarah dan nilai-nilai budaya kepada pengunjung. Selain itu, kuliner khas juga menjadi daya tarik utama lorong ini, banyak pedagang yang juga menjajakan berbagai hidangan tradisional yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Partisipasi aktif masyarakat

setempat dalam penyelenggaraan acara dan promosi juga sangat berdampak dalam meningkatkan popularitas lorong lorong ini.

Di sisi lain, Lorong Wisata kampung Ce'de 2 dan Lorong Wisata Nurul Anshar 5 belum dikelola dengan baik, meskipun memiliki potensi pemandangan alam berupa hamparan sawah yang indah, minimnya promosi dan kurangnya perhatian serta partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola kegiatan program menjadi faktor penghambat perkembangan lorong. Selanjutnya Lorong Wisata Paraikatte dan Lorong Wisata Nurul Anshar 6 yang memiliki produk kerajinan tangan yang dibuat oleh pengrajin lokal mulai dari anyaman sampai perhiasan yang terbuat dari bahan alami. Pengunjung tidak hanya bisa membeli oleh-oleh, tetapi juga dapat belajar tentang proses pembuatan dan terlibat langsung dengan pengrajin sehingga dapat menambah pengalaman berharga bagi pengunjung. Pada tahun 2024 jumlah lorong wisata di Kelurahan Lakkang sebanyak 21 Lorong Wisata.

Kelurahan Lakkang memiliki lokasi strategis yaitu berada di tengah tengah kota yang terbentuk dari proses sedimentasi dari sungai Tallo dan sungai Pampang yang memiliki luas wilayah 1.62 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.260 jiwa, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Aspek ekonomi yang berfokus pada hasil sungai dan tambak tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh konsumen di luar Kelurahan Lakkang. Namun, untuk memaksimalkan potensi ekonomi ini, penting bagi masyarakat untuk terus berinovasi dalam proses budidaya dan pengelolaan hasil. Pelatihan dan edukasi terkait teknik budidaya yang ramah lingkungan, serta cara-cara pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk akses ke pasar juga sangat membantu dalam pengembangan sektor ini.

Kelurahan Lakkang memiliki pesona alam yang memikat seperti tujuh bunker peninggalan jepang, hutan mangrove, hutan bambu, rumah-rumah panggung yang menjadi salah satu ikon budaya yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat setempat, pemandangan sawah yang indah dan sejuk, pemandangan dari atas perahu dengan pohon nipa di pesisir sungai yang sangat indah menuju Kelurahan Lakkang yang lebih dikenal dengan nama Pulau Lakkang. Tradisi leluhur dan kekayaan budaya yang unik dan masih terjaga menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Assurummaca merupakan tradisi leluhur yaitu menyediakan dupa dan berbagai makanan tradisional mulai dari ayam dan ikan yang kemudian diletakkan di atas terpal, ritual ini biasanya digelar setelah shalat maghrib dan dipimpin oleh seorang "Sanro". Kelurahan Lakkang yang kaya akan budaya dan tradisi dengan nilai gotong royong di mana mereka saling membantu dalam setiap aktivitas mulai dari pembangunan infrastruktur dan perayaan adat, kelompok ibu-ibu juga aktif dalam kegiatan Sabtu Bersih, yaitu kegiatan membersihkan bersama di sekitar hutan bambu.

Berikut merupakan wisatawan yang mengunjungi Kelurahan Lakkang.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kelurahan Lakkang

Tahun	Jumlah Wisatawan
2021	984
2022	1841
2023	920
2024	1132

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung tercatat sebanyak 984 orang, mencerminkan potensi awal pariwisata di Kelurahan Lakkang. Angka ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022, dengan total kunjungan mencapai 1.841 orang, yang menunjukkan respon positif terhadap upaya promosi dan pengembangan pariwisata. Namun, pada tahun 2023, jumlah wisatawan mengalami penurunan menjadi 920 orang, kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan dampak pasca-pandemi. Beruntung, pada tahun 2024 jumlah wisatawan kembali meningkat menjadi 1,132 orang, menandakan pemulihan dan harapan bagi sector pariwisata di Kelurahan Lakkang.

Pelaksanaan Program Lorong wisata di Kelurahan Lakkang hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Pada observasi awal penulis yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Nur Amin salah satu warga Kelurahan Lakkang mengungkapkan beberapa permasalahan yang ada, antara lain:

a) Kurangnya Fasilitas Dasar

Tidak adanya fasilitas tempat duduk di Lorong Wisata membuat pengunjung kesulitan untuk beristirahat setelah berkeliling yang menyebabkan rasa lelah dan ketidaknyamanan yang dapat mengurangi durasi kunjungan mereka. Dengan adanya tempat beristirahat, juga dapat menjadi area interaksi sosial di mana pengunjung dapat berbagi pengalaman dan menjalin hubungan dengan sesama wisatawan maupun masyarakat lokal sambil menikmati pemandangan alam. Selain itu, tidak adanya toilet menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan, banyak pengunjung yang kesulitan menemukan toilet sehingga perlu menumpang di rumah warga. Tidak tersedianya tempat sampah menyebabkan sampah menumpuk di berbagai sudut lorong dan merusak pemandangan. Banyaknya plastik, sisa makanan dan barang bekas lainnya yang ditinggalkan oleh pengunjung mencemari keindahan Lorong Wisata. pengunjung sering kali meninggalkan sampah sisa makanan dan plastiknya serta sampah dari pedagang yang ada di sekitar Lorong Wisata.

b) Minimnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lorong Wisata seringkali hanya terlihat pada saat momen tertentu, seperti pada saat menerima kunjungan tamu penting atau kegiatan tertentu. Ketika ada perhatian dari luar, masyarakat tampak aktif berkontribusi dalam membersihkan dan menghias Lorong Wisata, namun setelah acara tersebut berakhir, keterlibatan masyarakat cenderung menurun drastis. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah

satu hambatan utama bagi keberlangsungan program pengelolaan lorong, masyarakat seharusnya menyadari bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pihak pihak terkait, tetapi merupakan kewajiban bersama.

c) Promosi yang Lemah

Kelurahan Lakkang memiliki keindahan alam dan budaya yang unik, namun minimnya promosi melalui media sosial menyebabkan masih banyak orang luar yang belum mengetahui tentang keindahan dan keunikan Kelurahan Lakkang sehingga berdampak pada rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Upaya promosi yang dilakukan pengelola dan masyarakat setempat masih sangat kurang. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan strategi promosi dengan membangun kehadiran yang kuat di media sosial dengan konten menarik yang dapat mencuri perhatian banyak orang.

d) Keterbatasan Infrastruktur

Kondisi jalan yang berlubang dan berbatu menghambat akses bagi para pengunjung serta masyarakat lokal sehingga banyak orang enggan untuk berkunjung. Sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan genangan air terutama saat musim hujan. Ketika hujan deras, air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menyebabkan banjir lokal yang membuat jalan sulit dilalui dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Beberapa peneliti terdahulu diantaranya dilakukan oleh Syaiful Bahri (2021), hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Jakpreneur yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menggunakan pendekatan 7P, yaitu perekrutan, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan teori penelitian model implementasi program George C. Edward. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu meneliti Implementasi Program Jakpreneur dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sedangkan peneliti sekarang meneliti implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Muh. Nurfauzi Iksan (2023), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa program lorong wisata dinilai baik dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lorong-lorong. Meskipun demikian, kurangnya pendidikan di kalangan sebagian masyarakat di berbagai lorong mempengaruhi tingkat keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih efektif. Pemerintah Kota Makassar telah mulai mengambil langkah-langkah pembenahan yang signifikan untuk mengatasi masalah lingkungan, terutama terkait ruang sempit yang menjadi karakteristik kawasan lorong. Penelitian terdahulu ingin melihat efektivitas program Lorong Wisata di Kota Makassar, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yakni meneliti implementasi program lorong wisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar.

Muhammad Syahid Sirih dan Fathuddin Ma'mur (2024), dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pemasaran Makanan Tradisional Pada Program Lorong Wisata Kota Makassar, menunjukkan bahwa program Lorong Wisata di Kota Makassar belum berjalan secara optimal sebagai sarana untuk mempromosikan makanan tradisional Makassar. Hal ini dapat dilihat dari minimnya minat wisatawan untuk mengunjungi Lorong Wisata. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan disebabkan oleh daya Tarik Lorong Wisata yang masih belum maksimal, baik dari segi infrastruktur dan aktivitas wisata sehingga Lorong Wisata dianggap kurang menarik dan belum mampu memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan sama sama meneliti tentang program Lorong Wisata, namun peneliti terdahulu fokus penelitiannya yaitu pada efektivitas pemasaran makanan tradisional pada program Lorong Wisata sedangkan peneliti sekarang fokus penelitiannya yaitu pada implementasi program lorong wisata di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu membahas program Lorong Wisata secara umum, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada aspek spesifik implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dalam penelitian sekarang memberikan perspektif baru yang tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada realitas yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Lakkang.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar?. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis Implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang Kota Makassar dengan berpedoman pada teori implementasi George C. Edwards dengan empat faktor yaitu, komunikasi antara pembuat dan pelaksana, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program Lorong Wisata , serta strategi dan solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar)"**.

I.2 Tinjauan Teori

Selanjutnya, peneliti melakukan peninjauan terhadap beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai aspek pengukur dalam meneliti Implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang.

Pertama yakni teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi yang abstrak dan mempertanyakan syarat syarat yang diperlukan agar suatu kebijakan dapat berhasil. Dalam teori yang diusulkan Edward, terdapat 4 variabel dalam kebijakan publik, yaitu komunikasi antara pembuat dan pelaksana sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a) Komunikasi antara Pembuat dan Pelaksana

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Di mana sosialisasi tujuan dan sasaran program kebijakan dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya distorsi terhadap kebijakan dan program tersebut. Sehingga hal ini sangat penting karena semakin tinggi pemahaman kelompok sasaran mengenai program, semakin rendah tingkat penolakan dan kesalasan dalam penerapan program serta kebijakan di lapangan.

b) Sumber Daya

Setiap kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang cukup, baik dari segi manusia maupun finansial. Sumber daya manusia mencakup kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial merujuk pada kecukupan modal yang diperlukan untuk sebuah program atau kebijakan. Keduanya sangat penting dalam pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Tanpa pelaksana yang kompeten, kebijakan dapat menjadi kurang efektif dan berjalan lambat. Di sisi lain, dukungan finansial yang memadai sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program dan kebijakan, sehingga tanpa dukungan finansial yang cukup, program tidak akan dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

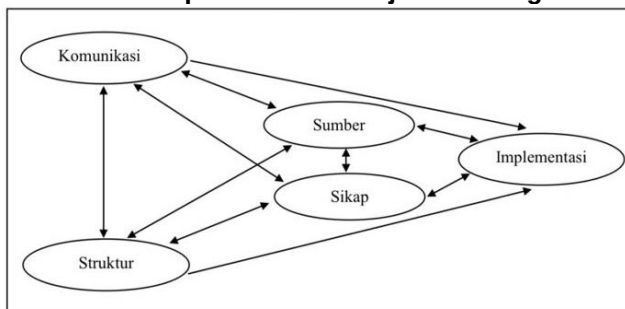
c) Disposisi

Yaitu, karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Beberapa sifat yang harus dimiliki pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan sikap Demokratis. Pelaksana yang memiliki komitmen dan kejujuran tinggi akan mampu menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program. Kejujuran membantu mereka tetap berpegang pada rencana yang telah ditetapkan dalam pedoman program. Komitmen dan kejujuran pada pelaksana dapat mendorong mereka untuk melaksanakan tahap-tahap program dengan penuh semangat dan konsisten. Sedangkan sikap Demokratis akan memberikan kesan positif bagi kelompok sasaran, sehingga dapat mengurangi penolakan dari masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap pelaksana program.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek ini terdiri dari dua elemen yaitu mekanisme dan struktur Birokrasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam pedoman program atau kebijakan. SOP yang baik harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksana. Di sisi lain, struktur organisasi pelaksana harus dirancang untuk menghindari kompleksitas dan kebingungan. Struktur ini harus mampu memastikan pengambilan keputusan yang cepat dalam menghadapi situasi luar biasa dalam program. Sehingga desain struktur yang ringkas dan fleksibel diperlukan untuk menghindari sifat kaku dan terlalu hirarkis yang sering kali ada dalam Birokrasi.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards



Kedua teori menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses yang dimulai dengan pengesahan Undang-Undang sebagai aturan hukum, diikuti oleh pelaksanaan keputusan yang diambil oleh badan instansi terkait. Di mana instansi tersebut bersedia untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan bersiap menerima dampak baik dari yang yang diharapkan maupun tidak dari keputusan tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

a) Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the Problems*)

Terdapat tingkat kesulitan teknis terkait masalah yang dihadapi. Di mana, beberapa masalah sosial dapat diselesaikan dengan relatif mudah, seperti kekurangan pasokan air minum atau lonjakan harga beras. Namun, di sisi lain, terdapat masalah sosial yang lebih kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Oleh karena itu, karakteristik masalah itu sendiri yang akan mempengaruhi sejauh mana suatu program dapat diimplementasikan. Dengan demikian, keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada masalah sosial yang ada; semakin besar masalah sosial, semakin sulit mencapai tolok ukur keberhasilan, terutama untuk persoalan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah.

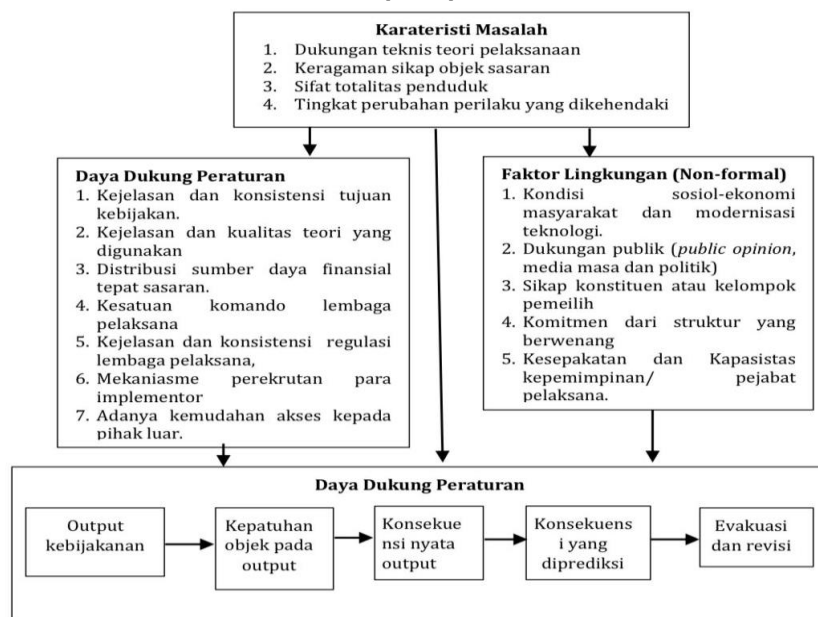
b) Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (*Ability of Statute to Structure Implementation*)

Karakteristik kebijakan mencakup kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci suatu kebijakan, maka semakin mudah bagi pelaksana untuk memahami dan menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan dalam kebijakan dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kejelasan kebijakan sangat penting agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dukungan teoritis dari kebijakan tersebut.

c) Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi. Di mana masyarakat yang terbuka dan terdidik cenderung lebih mudah menerima program-program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan bersifat tradisional. Selain itu, kemajuan teknologi dapat mendukung keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan dijalankan dengan bantuan alat dan teknologi modern.

Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (1980)



Teori ketiga Model Rippley dan Franklin (1986), memperkenalkan model ini dengan menekankan pendekatan realistis dari implementor dalam mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam literature administrasi publik, kepatuhan menggambarkan ketaatan dan disiplin anggota atau bawahan terhadap kebijakan yang telah diputuskan. Kebijakan yang bersifat top-down berkaitan erat dengan teori teori rasional yang menekankan pada intervensi penyelenggara dalam menangani setiap masalah publik tanpa adanya interaksi dalam membangun consensus (Suprpto et al., 2023).

Ripley dan Franklin, mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a) Kepatuhan Implementor

Sebagai implementor dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, kesatuan perintah merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kesiapan mental dan sikap harus dipersiapkan untuk menghadapi tekanan serta factor eksternal dan empiris di lapangan.

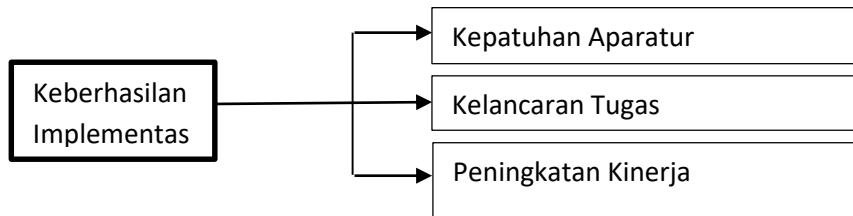
b) Kelancaran Pelaksana Tugas Rutin

Setiap implementor perlu memastikan bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi masalah yang mungkin akan timbul.

c) Terwujudnya Kinerja yang Efisien

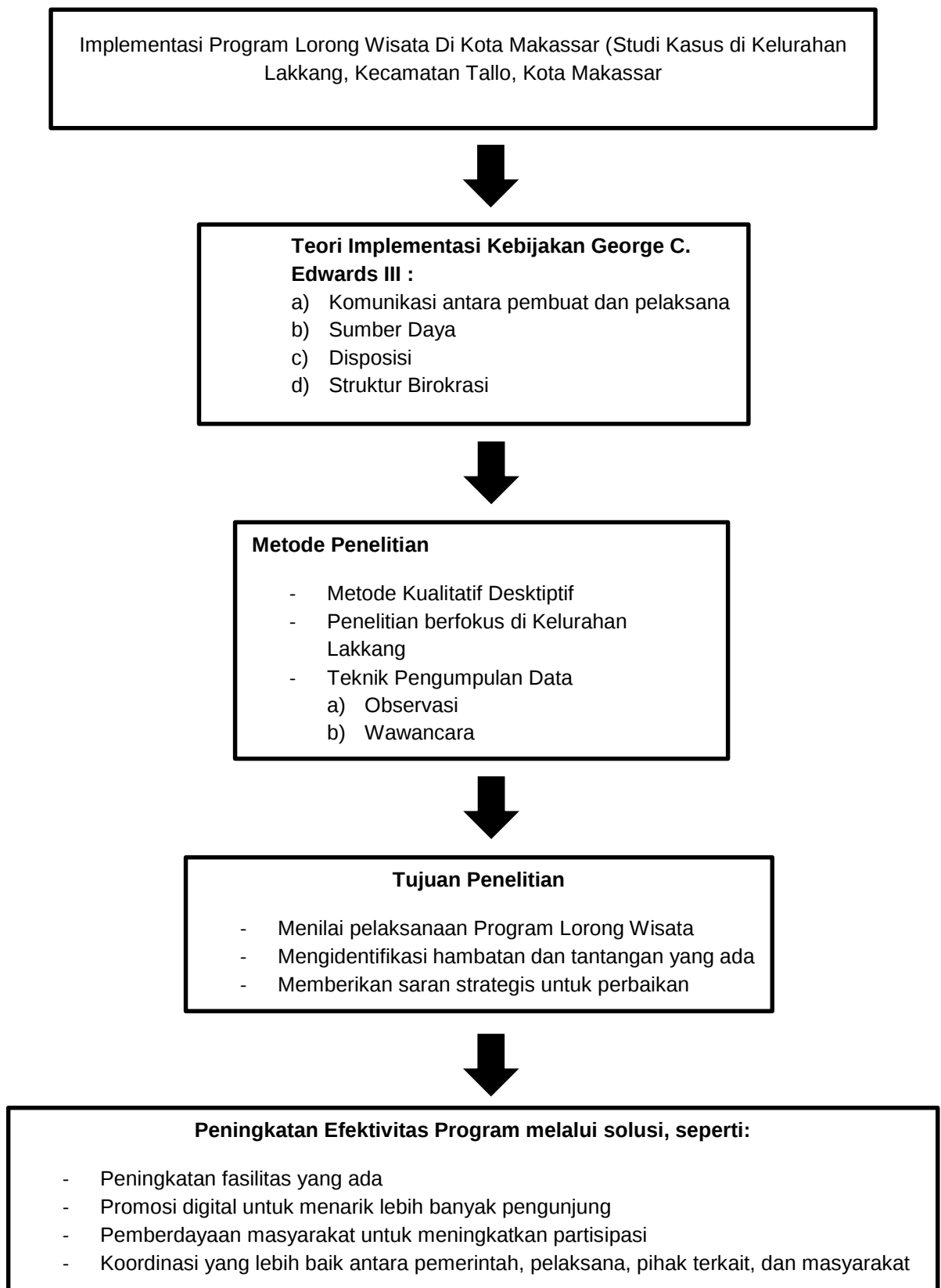
Setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan menurut Rippley dan Franklin (1986)



Teori keempat model komunikasi Shannon dan Weaver (1949) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima (reciever) untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya noise atau gangguan. Model ini memprkenalkan gagasan tentang gangguan yang dapat menghalangi penerimaan. Meskipun sederhana, model ini sangat memengaruhi studi komunikasi teknis, serta digunakan dalam komunikasi interpersonal dan massa.

Dalam penelitian ini, penulis mengintegrasikan berbagai pendekatan yang relevan untuk memahami implementasi kebijakan publik. Peneliti kemudian memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III. Teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III dipilih sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini karena membrikan kerangka kerja yang komprehensif dan praktis untuk menggambarkan dan menganalisis keberhasilan dan hambatan dalam implementasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program serupa di daerah lain.

Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan berlandaskan pada Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dengan empat variabel yaitu komunikasi antara pembuat dan pelaksana, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

I.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a) Bagi civitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- b) Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Lorong Wisata di Kota Makassar.
- c) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran dan peran masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan program Lorong Wisata.

BAB II METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian terkait Implementasi program Lorong Wisata di Kota Makassar (Studi Kasus di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan kunjungan ke lokasi penelitian. Pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program, termasuk tantangan dan peluang yang ada.

II.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian menggunakan desain penelitian studi kasus (Case Study) yang merupakan strategi penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, serta kasus tertentu. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan secara lengkap menggunakan prosedur pengumpulan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah (Creswell, 2018).

Tipe studi kasus yang digunakan yaitu deskriptif, bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu gejala, fakta atau realitas terkait dengan Implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, Kecamatan tallo, Kota Makassar.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu (sugiono,2007). Informan adalah individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan implementasi Program Lorong Wisata. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 2. Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Safaruddin, SS	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata
2.	Arni	Staff kantor Kelurahan Lakkang
3.	Hariany	Dewan Lorong
4.	Nur Amin	Warga
5.	Muh. Ibrahim	Warga
6.	Nirwana Talle	Warga
7.	Salma	Pengunjung
8.	Hildah	Pengunjung

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk kondisi fisik Lorong Wisata, interaksi antar masyarakat, dan aktivitas yang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat gejala dan situasi secara sistematis berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini dilakukan observasi di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

b) Wawancara

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang. Wawancara ini dilakukan secara langsung, dengan panduan pertanyaan yang tetap fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan objek penelitian (Zuriah, 2009).

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan resmi, foto, video, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang. Data ini memberikan konteks tambahan yang diperlukan untuk memahami implementasi program secara lebih menyeluruh (Relia, 2009).

II.3.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga langkah utama:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi disederhanakan, dirangkum, dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan dengan implementasi program Lorong wisata. Proses ini membantu peneliti untuk memfokuskan pada informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti tantangan yang dihadapi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas komunikasi antara pelaksana dan masyarakat.

b) Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, bagan, matriks, atau table untuk menggambarkan kondisi Lorong wisata secara jelas. Penyajian data ini memudahkan analisis dan interpretasi, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul, seperti tingkat keterlibatan masyarakat dan efektivitas fasilitas yang ada.

c) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan atau temuan yang diperoleh dari analisis data. Misalnya, verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan masyarakat, pengelola dan instansi pemerintah.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

a) Validitas

Validitas data merujuk pada proses untuk memastikan apakah informasi yang diperoleh selama penelitian akurat atau relevan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas dapat dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti analisis dokumen, observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan masyarakat lokal (Maleong, 2011).

b) Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada konsistensi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti memastikan bahwa pengukuran atau pengamatan yang dilakukan tetap stabil dan dapat diandalkan meskipun diulang dalam waktu yang berbeda. Untuk mencapai hal ini, peneliti mengidentifikasi dan mengatasi faktor faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam proses penelitian, sebagai variasi dalam cara wawancara atau kondisi saat observasi (Sugiyono, 2016). Dengan memastikan reabilitas data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keberhasilan implementasi Program Lorong Wisata dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Lakkang.

II.3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada potensi wisata dan keunikan yang dimiliki kawasan ini termasuk daya tarik alam, budaya, dan sejarah. Kelurahan Lakkang juga mencerminkan variasi sosial dan ekonomi di Kota Makassar, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang implementasi Program Lorong Wisata.

II.3.6 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan menggunakan teori implementasi George C. Edwards yang mencakup 4 komponen, yaitu komunikasi antara pembuat dan pelaksana, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi antara pembuat dan pelaksana

- a) Komunikasi antara pembuat dan pelaksana, yaitu menganalisis bagaimana informasi mengenai program Lorong Wisata di Kelurahan Lakkang disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta efektivitas saluran komunikasi yang digunakan.
- b) Sumber Daya, yaitu mengkaji ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi program Lorong Wisata di Kelurahan, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap keberhasilan program.
- c) Disposisi, yaitu mengevaluasi pengaruh sikap, motivasi, dan komitmen pihak-pihak yang terlibat terhadap pelaksanaan program.
- d) Struktur Birokrasi, yaitu menganalisis efisiensi hierarki organisasi, alur komunikasi, dan pembagian tugas di antara lembaga dan individu yang terlibat.